



Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx)

ANALISSA HUWAINA^{1*}, ANINDITA PRABAWATI¹, ANINDYA DEWI¹

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia; 10430, Indonesia

*Korespondensi: analissa.huwaina@ui.ac.id

Tanggal Diterima: 25 Januari 2024

Tanggal Terbit: 29 Februari 2024

ABSTRACT

The Kendeng mountains, stretching from several regions in Central Java to East Java, have the potential for abundant limestone and groundwater resources. This poses a problem when the government and investors seek to exploit these resources for commercial purposes, while local communities and influential academics choose it as a conservation site. Based on the Governor of Central Java's Decree Number 660.1/17 of 2012 regarding the Environmental Permit for Mining Activities by PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, which has been renamed PT. Semen Indonesia since 2012, they have been conducting mining activities in the Kendeng Mountains region. Subsequently, both the local community and environmental organizations have filed lawsuits concerning the feared deterioration of groundwater quality. This research aims to describe the conflicts arising from the rejection of the cement factory construction in Kendeng by conducting a descriptive analysis with data collection techniques from literature studies and content analysis of mass media. Karl Marx's conflict theory is employed to analyze the focus of this research. The conclusion drawn is that despite various legal efforts to address the rejection of the factory construction, in practice, decisions on construction and environmental permits for mining activities are still within the jurisdiction of local authorities.

KEYWORDS: conflict; environment; karst ecosystem; Kendeng mountains

ABSTRAK

Pegunungan Kendeng yang membentang dari beberapa daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur memiliki potensi sumber daya batu kapur dan air tanah yang melimpah. Hal ini menimbulkan masalah ketika pihak pemerintah dan investor ingin memanfaatkan sumber daya tersebut untuk komersil sedangkan masyarakat lokal dan para akademisi yang berpengaruh memilihnya sebagai lokasi konservasi. Dengan berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, yang sejak 2012 berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia, mereka melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. Selanjutnya baik dari masyarakat dan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan mengajukan gugatan mereka berkenaan dengan kualitas air tanah yang dikhawatirkan akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi dalam penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng dengan melakukan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi pustaka dan analisis isi dari media massa. Teori konflik dari Karl Marx digunakan untuk menganalisis fokus kajian pada penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meski dilakukan beragam upaya hukum untuk menindaklanjuti penolakan pembangunan pabrik, pada pelaksanaannya keputusan pembangunan maupun pemberian izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan tetap dikembalikan kepada kewenangan daerah.

KATA KUNCI: ekosistem karst, konflik, lingkungan, pegunungan Kendeng

Cite This Article:

Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx). *Environment Conflict*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.61511/environc.v1i1.2024.463>

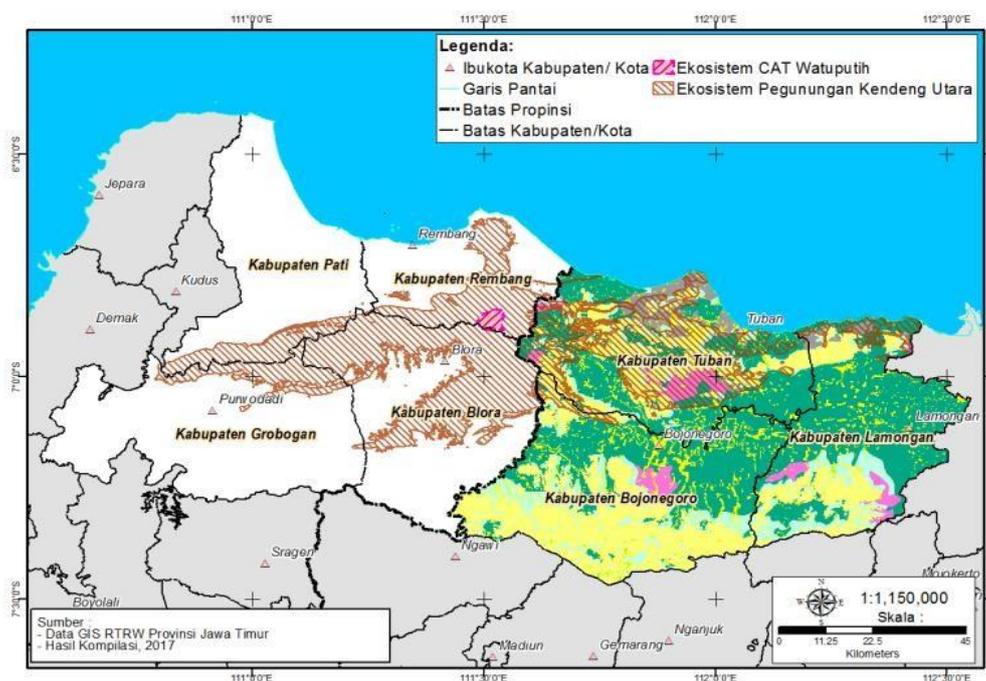
Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Konflik mengenai sumber daya alam di Indonesia sebagian besar terjadi karena adanya perbedaan perspektif dan kepentingan sumber daya. Beberapa penelitian konflik terkait kegiatan pertambangan dan eksploitasi lingkungan sudah banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Iqbal *et al.* (2013) yang meneliti tentang pendeteksian perubahan penggunaan lahan di area eksploitasi batu kapur di Taman Nasional Perbukitan Margalla di Pakistan, hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi batu kapur mempengaruhi area tutupan vegetasi secara langsung, akibatnya mempercepat terjadinya erosi. Selain itu lingkungan juga semakin tercemar dan mengubah ekosistem alam dan keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional tersebut. Lalu penelitian mengenai gerakan perlawanan lembaga swadaya masyarakat Cagar Tuban dalam menghadapi rencana pembangunan PT. Holcim Indonesia oleh Ma'arif dan Imron (2014). Gerakan perlawanan tersebut merupakan bagian dari usaha mereka untuk menyelamatkan lingkungan dan menolak pembangunan pabrik yang mengancam kawasan tanah kapur.

Permasalahan lingkungan yang terjadi terkait rencana pembangunan pabrik semen dan kegiatan pertambangan yang terjadi di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Gambar 1), muncul pada tahap awal setelah rincian pembangunannya disampaikan kepada masyarakat setempat (Warassih *et al.*, 2018). Beberapa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan konflik ruang antara kawasan industri dan kawasan lindung, konflik lain ialah beralihnya fungsi lindung menjadi kawasan budidaya. Secara sosial, ekonomi, maupun politik konflik ini telah lama menguras banyak energi (Warassih *et al.*, 2018). Secara garis besar ada tiga hal yang perlu diperhatikan pada konflik yang terjadi di Pegunungan Kendeng yaitu; kemunculan cikal bakal penolakan, pertemuan dengan pihak luar, dan penolakan masyarakat (Hidayatullah *et al.*, 2016).



Gambar 1. Peta wilayah studi KLHS Pegunungan Kendeng (KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Pegunungan Kendeng Utara termasuk dalam kategori daerah kering, di mana masyarakat mengandalkan air yang dipasok dari kawasan Karst untuk keperluan rumah tangga dan juga irigasi (Hadi *et al.*, 2018). Sumber daya kapur yang melimpah memiliki potensi besar untuk menjadi bahan baku produksi semen, kosmetik, cat, dan produk komersial yang lain (Hadi *et al.*, 2020). Bentang alam Karst khususnya lanskap karst tropis

memiliki nilai potensial untuk menyimpan sejumlah karbon organik yang berasal dari biomassa ekosistem hutan yang berada di lanskap Karst, dan karbon anorganik yang tersimpan pada batuan karbonat (CaCO_3) (Danardono *et al.*, 2019). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, tutupan lahan yang dominan pada kawasan ini pada tahun 2016 adalah hutan (138.532 ha atau 50% dari total wilayah), sawah (79.417 ha atau 29%), pertanian lahan kering (46.684 ha atau 17%), ruang terbangun (9.705 ha atau 4%).), dan area pertambangan (1.140 ha atau 0,4%).

1.1 Teori ilmu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Isu lingkungan adalah permasalahan yang sulit untuk dipahami, dimana meliputi keterkaitan tumpang tindih yang kompleks antara aspek ekologi, fisik dan sistem manusia, sehingga membutuhkan sebuah pendekatan sistem untuk menganalisis dan dapat memecahkan masalah (Lucas, 2010). Maka diperlukan sebuah studi interdisiplin yang menggabungkan ilmu alam dan sosial seperti yang dikatakan oleh Miller dan Spoolman (2016) bahwa ilmu lingkungan merupakan studi dari sistem cara kerja bumi, bagaimana berinteraksi dengan bumi, serta bagaimana dapat menghadapi dan mengurangi masalah lingkungan yang semakin berkembang. Ilmu lingkungan tidak hanya berfokus pada lingkungan saja namun lebih kepada ketidak harmonisan lingkungan yang muncul akibat dari interaksi manusia dan alam dari berbagai sudut pandang seperti aspek historis, ekonomi dan politik serta peran dari perbedaan pengalaman sosial dan etika, lalu memadukan aspek-aspek tersebut dengan ilmu pengetahuan (Enger dan Smith, 2016). Sedangkan keberlanjutan adalah sebuah komposisi dari interdependensi, partisipasi, rasa hormat, rasionalisme, pemikiran strategis dan harmoni dari manusia dan elemen alam lainnya (Genç, 2013). Sedangkan pembangunan berkelanjutan menurut Singh (2014) adalah kesetaraan dalam pengemangan dan aktivitas per sektor yang membutuhkan integrasi ekonomi, sosial, serta pendekatan lingkungan terhadap pembangunan dalam ruang dan waktu.

1.2 Teori konflik

Penyebab munculnya sebuah konflik adalah adanya hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang berpangkal dari perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlahnya sangat terbatas dan pembagiannya di masyarakat tidak merata (Setiadi dan Kolip, 2013). Alasan instrumental dalam konflik adalah logika yang memperlakukan manusia sebagai objek sehingga kelompok tertentu mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain (Fuchs, 2017). Seringkali pengelolaan ekonomi dan lingkungan ditentukan top down oleh sekelompok kecil orang dengan cara yang sempit dan tidak demokratis (Parra dan Walsh, 2016). Pendekatan konflik sosial-lingkungan hadir untuk melengkapi pemahaman, karena dengan pendekatan tersebut akan mendapat gambaran kelembagaan dan relasi kekuasaan yang tidak hanya mendasari penyebab konflik tetapi juga membatasi kerangka dimana tindakan untuk menyelesaikannya (García-Frapolli *et al.*, 2018).

1.3 Teori konflik Karl Marx

Penyebab konflik adalah hubungan sosial, ekonomi dan politik, dimana akar penyebabnya adalah perebutan kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan serta ketersediaan dan distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2013). Karl Marx menyebutkan bahwa kelompok kekuasaan memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan hidup yang tidak dimiliki masyarakat tidak mampu. Marx percaya bahwa di antara dua kelas—penguasa dan subjek—yang pertama tetap berada pada posisi yang sama karena secara ekonomi unggul selama bertahun-tahun dibandingkan dengan kaum proletar yang mengalami mobilitas sosial yang terbatas. Marx melihat

masyarakat sebagai arena konflik sosial. Baginya, fungsi dan peran serta lembaga sosial dapat dipahami dengan baik melalui sistem ekonominya (Omer dan Jabeen, 2016).

Asumsi dari teori konflik adalah bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial yang saling bertentangan. Akar penyebab konflik sosial adalah distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Kekuasaan tersebut mencakup akses ke sumber daya. Tingkat kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Dengan demikian, puncak pada tujuan akhir ketika proletariat mengakui posisinya sebagai subjek- objek sejarah, menandai sistemnya "tertutup," dan tidak mampu mengapresiasi dinamisme dan ketidakpastian pendekatan evolusi yang benar (Ford dan McCulloch, 2012). Menurut Karl Marx, yang dimaksud dengan tenaga-kerja adalah "kumpulan dari kemampuan mental dan fisik yang ada dalam bentuk tubuh serta kepribadian yang hidup yang ada dari seorang manusia, tenaga kerja memiliki kemampuan yang ia gerakkan setiap kali ia menghasilkan nilai guna dalam bentuk apa pun". Kemampuan mental dan fisik dari tenaga kerja, serta potensi untuk bekerja, inilah yang kemudian dikonsumsi untuk menghasilkan kerja nyata. Dalam kegiatan produksi kapitalis, tenaga kerja merupakan hal yang sama dengan komoditas, yang "dijual" oleh para tenaga kerja kepada para kapitalis (Rugitsky, 2013). Deskripsi mengenai ketenagakerjaan tersebut kemudian disampaikan oleh Harry Braverman (1974) sebagai berikut; "sesuatu dijual oleh para tenaga kerja (atau, apa yang dibeli oleh kapitalis), bukanlah jumlah kerja yang disepakati, tetapi kekuatan, kemampuan, daya dan potensi untuk bekerja selama periode waktu yang disepakati. Ketidakmampuan untuk membeli tenaga kerja, yang merupakan fungsi tubuh dan mental yang tidak dapat dicabut, dan kebutuhan untuk membeli kekuatan untuk melaksanakannya, begitu sarat dengan konsekuensi bagi seluruh mode produksi kapitalis sehingga harus diselidiki lebih dekat." (Rugitsky, 2013).

Karl Marx menempatkan perjuangan kelas sosial sebagai pusat kapitalisme. Objek perjuangan antara kapitalis dan pekerja tidak terbatas pada nilai yang digunakan pekerja untuk menjual tenaga kerja mereka, tetapi secara krusial meluas pada penentuan berapa banyak kerja yang sebenarnya akan dilakukan oleh para pekerja. Apa yang sanggup tenaga kerja jual atau tawarkan adalah tenaga dan potensi kerjanya. Perjuangan ini tidak hanya terbatas pada sekadar pertanyaan tentang "jam dan upah", namun juga ada beberapa masalah lainnya yang diperjuangkan oleh para tenaga kerja, seperti sifat dan intensitas proses kerja, mekanisasi dalam perusahaan, kondisi atau lingkungan tempat kerja, tunjangan sosial yang diperoleh, dan hak-hak pekerja. Hal-hal tersebutlah yang seringkali menjadi titik terjadinya konflik antarkelas sosial (Rugitsky, 2013). Para pihak yang berkonflik merupakan aktor kolektif yang secara moral meyakini akan legitimasi dari tindakan yang mereka lakukan karena mereka memiliki norma yang telah diterima dalam masyarakat. Dalam hal ini, fraksi kelas tenaga kerja akan mengklaim "kebenaran" dimana mereka menuntut transformasi dari demokrasi politik menjadi demokrasi sosial. Di sisi lain, kelompok kapitalis, atau beberapa literatur menyebutnya sebagai borjuis, akan menentang tuntutan para pekerja dengan interpretasi normatif tentang "kepemilikan pribadi" (Honneth, 2018).

1.4 Pabrik Semen Kendeng

Isu utama dalam permasalahan lingkungan karst antara lain adalah perubahan bentang alam, pencemaran air, hilangnya sumber air, dan penurunan nilai keanekaragaman hayati. Karena daya dukungnya rendah, karst menjadi kawasan yang peka terhadap perubahan dan sulit untuk diperbaiki apabila rusak akibat pertambangan atau pertanian yang menyebabkan erosi, banjir, turunnya permukaan tanah, mata air menghilang, dan pencemaran air dan udara. Terganggunya sistem ekologi di kawasan ini akan mengakibatkan berkurangnya flora dan fauna yang memiliki nilai ekonomi, akibatnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan karst juga akan berkurang (Yue *et al.*, 2015).

Pegunungan Kendeng Utara adalah hamparan perbukitan kapur yang merupakan produk dari dinamika bumi yang menghasilkan fenomena alam unik yang disebut karst landscape (Fifing *et al.*, 2018). Kekayaan alam pegunungan kendang melimpah baik batu gamping maupun batuan lainnya yang dapat dimanfaatkan agar dapat menjadi lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat. Penolakan yang terjadi pada lokasi studi karena masyarakat beranggapan penambangan yang dilakukan oleh pabrik semen akan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah dengan pabrik semen sejak tahun 2013 merupakan konflik vertikal dan struktural (Rokhmad, 2020). Implikasi dari eksploitasi sumber daya alam oleh banyaknya kegiatan pertambangan di Pegunungan Kendeng berakibat menipisnya jumlah sumber mata air, juga dapat menghilangkan kekayaan keanekaragaman hayati (Pravitasari *et al.*, 2020). Pembangunan yang dilakukan hanya memperhatikan aspek keuntungan ekonomi saja tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan (Khusnia dan Warsito, 2018).

Kekayaan alam pegunungan kendang melimpah baik batu gamping maupun batuan lainnya yang dapat dimanfaatkan agar dapat menjadi lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat. Penolakan yang terjadi pada lokasi studi karena masyarakat beranggapan penambangan yang dilakukan oleh pabrik semen akan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah dengan pabrik semen sejak tahun 2013 merupakan konflik vertikal dan struktural (Rokhmad, 2020). Implikasi dari eksploitasi sumber daya alam oleh banyaknya kegiatan pertambangan di Pegunungan Kendeng berakibat menipisnya jumlah sumber mata air, juga dapat menghilangkan kekayaan keanekaragaman hayati (Pravitasari *et al.*, 2020). Kawasan karst adalah akuifer yang baik, proses penambangan akan menyebabkan berkurangnya volume tanah dan batuan yang berfungsi sebagai penyimpan air tanah yang menurunkan jumlah serta durasi air tertinggal di lapisan batuan (Alden, 2009). Oleh sebab itu bagi wilayah di bawahnya berpotensi kekurangan air pada musim kemarau dan terjadi banjir pada musim hujan. Aktivitas pertambangan di kawasan karst juga dapat mengakibatkan bertambahnya kerusakan lahan dan lingkungan, lapisan epikarst yang merupakan lapisan tipis pada tanah yang berfungsi sebagai penahan air akan terus berkurang (Iqbal *et al.*, 2013).

1.5 Otonomi dan pembangunan daerah

Dalam proses pelaksanaan berbagai kegiatan dalam urusan otonomi di daerah, di dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut terdapat beberapa unit organisasi yang saling berhubungan dan melibatkan fungsional yaitu walikota atau bupati (pemimpin daerah), organisasi (instansi teknis), Bappeda dan Bendahara, Sekertaris Daerah. Setiap rencana kerja tahunan wilayah harus melalui tahap review terlebih dahulu oleh Bappeda dan Kementerian Keuangan sebelum disetujui oleh Walikota atau Bupati (Habibi, 2015). Proses ini sesuai seperti yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dimana pemannfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu daerah, termasuk sumber daya alam, merupakan wewenang dari daerah untuk mengelola yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan memperhatikan kebijakan lingkungan baik fisik, biotik dan sosial. Berdasarkan UU tersebut, maka otonomi daerah memberikan banyak kekuasaan dan keleluasaan kepada masing-masing daerah ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan. Hal ini, sayangnya, seringkali mengakibatkan kebijakan lingkungan hidup yang tumpang tindih dengan daerah lain, juga dapat mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan (Triana, 2014).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena konflik yang terjadi, dan bertujuan untuk menjelaskan konflik tersebut secara terperinci dan dengan menggunakan salah satu teori konflik dari Karl Marx

sebagai sudut pandang lain. Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dari beberapa jurnal dan artikel terkait konflik yang terjadi di Pegunungan Kendeng, dan analisis isi artikel dari media massa. Data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

2.1 Jasa ekosistem Pegunungan Kendeng

Jasa ekosistem memiliki potensi untuk memberi umpan balik kepada lingkungan dan sosial dengan memberikan manfaat lingkungan dan sosial. Perubahan sumber daya akibat dari perubahan lingkungan dapat berdampak pada jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem (Lin dan Egerer, 2020). Pengelolaan berbasis ekosistem adalah pendekatan manajemen kolaboratif bertujuan untuk memulihkan, meningkatkan dan melindungi ketahanan ekosistem atau meningkatkan jasa ekosistem serta melindungi keanekaragaman hayati, sembari mempertimbangkan alam dan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan mendukung integrasi tujuan dan koordinasi kebijakan, mengembangkan dan menggunakan secara kuantitatif, kualitatif dan spasial (Langhans *et al.*, 2019).

Kars merupakan bentang lahan yang sebagian besar komposisi tanahnya terdiri dari kapur, baik dalam bentuk kalsium karbonat (CaCO_3), dolomit, maupun senyawa lain yang membentang. Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, bentang alam karst dapat berupa endokarst maupun eksokarst. Eksokarst merupakan bentuk singkapan yang dapat diamati langsung dari permukaan tanah, baik dalam bentuk bukit, uvala, dolina, mata air karst bahkan dapat membentuk telaga karst. Di sisi lain, endokarst merupakan bentang lahan karst yang tersembunyi, seperti sungai bawah tanah karst dan juga speleotem. Bentangan karst yang terdapat di kawasan Kecamatan Sukolilo memiliki ciri-ciri eksokarst, yakni bentuk kubah tumpul serta tidak terjal yang dapat diamati langsung. Kawasan ini sangat penting dalam ekosistem karena memberikan berbagai jasa lingkungan seperti, penyerap air, mencegah atau mengurangi banjir, mengandung sumber air di sungai dan gua bawah tanah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (Sentosa *et al.*, dalam Purnaweni, 2014). Berdasarkan pendapat Haryono *et al.*, (2002) dalam (Cahyadi dan Priadmodjo, 2012) kawasan karst memiliki fungsi sebagai; obyek kajian ilmu pengetahuan, seperti proses geologi yang terjadi, sarana rekreasi seperti gua dan bukit, serta penyedia jasa ekosistem berupa air. Kawasan karst umumnya sangat sensitif terhadap keberadaan air sehingga berkorelasi pula dengan sosial budaya masyarakat. Selain itu, bentang alam karst menjadi habitat pendukung keanekaragaman jenis flora dan fauna; serta berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, sehingga karst turut berperan dalam mengurangi laju pemanasan global. Karst di kawasan Kecamatan Sukolilo memiliki ciri yakni kubahnya tumpul dan tidak terjal. Dalam ekosistem kawasan ini berperan penting karena memberikan berbagai jasa lingkungan seperti; menyerap air, mencegah dan mengurangi banjir, mengandung sumber air di sungai dan gua bawah tanah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (Sentosa *et al.*, dalam Purnaweni, 2014). Berdasarkan pendapat Haryono *et al.*, (2002) dalam (Cahyadi dan Priadmodjo, 2012) kawasan karst memiliki fungsi lain sebagai; obyek kajian ilmu pengetahuan; kawasan yang sangat sensitif terhadap keberadaan air dan sosial budaya masyarakat; habitat pendukung keanekaragaman jenis flora dan fauna; serta berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, salah satu proses alam yang dapat mengurangi laju pemanasan global.

Akuifer karst adalah salah satu sumber utama pasokan air di seluruh dunia, namun juga salah satu yang paling bermasalah karena alirannya tidak stabil. Pada daerah dengan iklim kering atau semi-kering dengan curah hujan rendah dan penguapan besar, eksploitasi akuifer yang berlebihan dan penipisan sumber daya air seringkali terjadi (Stevanovic, 2013).

Jasa ekosistem dapat dilihat berdasarkan ekoregion yang terbentuk, ekoregion dapat diartikan sebagai kondisi geografis dari ekosistem. Penetapan ekoregion menghasilkan batasan (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar (KLHK, 2013). Ekoregion terdiri dari penutup lahan, bentang alam, dan vegetasi. Berdasarkan klasifikasi bentang alam yang sudah ditetapkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pegunungan kendeng termasuk kedalam bentang alam

Perbukitan Karst Jalur Bogor – Kendeng – Rembang dan Perbukitan Struktural Jalur Bogor – Kendeng – Rembang.

Dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan tahun 2017 fungsi CAT (Cekungan Air Tanah) Watuputih pada pegunungan kendeng dan sekitarnya sebagai penyedia jasa ekosistem penyedia air dimana harus dicegah dari kerusakan. Fungsi penyedia air dari CAT Watuputih sangat penting terhadap Kabupaten Rembang maupun wilayah sekitarnya, dimana menjadi sumber air domestik maupun untuk kegiatan pertanian. CAT Watuputih memberikan manfaat secara luas dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun perkembangan wilayah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konflik Pabrik Semen Kendeng

Lingkungan karst memiliki bentuk lahan dan ciri hidrologi khas yang didominasi oleh drainase yang berada di bawah permukaan. Sistem karst dapat menjadi sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi karena berbagai faktor seperti geologi dan hidrologi. Rancangan dan pengembangan sebuah proyek di lingkungan karst memerlukan pendekatan khusus yang bertujuan untuk meminimalkan efek negatif dari proses berbahaya dan masalah lingkungan, karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah besar dengan dampak ekonomi yang tinggi (Parise *et al.*, 2015). Pegunungan Kendeng sudah ditetapkan sebagai area konservasi yang seharusnya dilindungi dengan bukti penetapannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 0397 K/40/MEM/2005. Namun, pihak penambang atau PT Semen Indonesia banyak melakukan usaha untuk tetap dapat menjalankan penambangan di pegunungan Kendeng Utara; termasuk penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Lindung Karst Sukolilo (Purnaweni, 2014). Tujuan dari penetapan kawasan lindung Sukolilo terdapat dua tujuan yaitu: a. Memberikan perlindungan terhadap karst sukolulo dan b. Sebagai pedoman bagi pemanfaatan sumber daya bahan tambang di Karst Sukolilo tanpa mengurangi kawasan lindung.

Permintaan pasar terhadap kebutuhan semen setiap tahunnya meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan kebutuhan bahan baku semen. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu badan usaha milik negara yang berkekuatan di bidang tersebut berniat untuk membangun pabrik semen di kawasan Watuputih. Karst sebagai bahan baku utama semen banyak melimpah di kawasan tersebut, selain itu batu gamping dan tanah liat juga menjadi obyek penambangan yang dilakukan PT. Semen Indonesia. Yang menjadi landasan PT. Semen Indonesia melakukan kegiatan penambangan di kawasan Pegunungan Kendeng adalah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, yang sejak 2012 berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia. Kemudian sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur tersebut banyak investor yang melirik penambangan di Pegunungan Kendeng untuk berinvestasi dalam skala besar. Melihat adanya penetapan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh gubernur, masyarakat terutama kaum perempuan di pegunungan Kendeng beraksi dengan melakukan penolakan terhadap penambangan. Masyarakat sadar bahwa eksploitasi terhadap Pegunungan Kendeng akan berakibat pada sistem perairan dimana itu menjadi sumber air sehari-hari maupun sumber ekonomi pada sektor pertanian. Penolakan yang dilakukan bersifat terbuka dan berani dengan memegang teguh prinsip tidak melakukan kekerasan serta perlawanan ini dibantu oleh berbagai pihak lain selaku penggiat pelestarian lingkungan (Purnaweni, 2014).

Penolakan yang terjadi berifat terbuka dan adanya bantuan pelestari lingkungan dalam kegiatan penolakan, media mulai menyadari adanya aksi penolakan tersebut. Mulai masuknya muncul media terhadap aksi penolakang tersebut menjadi tersebar ke berbagai kalangan masyarakat secara nasional. Padahal dengan melihat latar belakang pelaku penolakang yang merupakan masyarakat kendeng berprofesi sebagai petani dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan kemampuan komunikasi yang terbatas. Semakin lama kemampuan komunikasi pelaku penolakan menjadi lebih baik dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi. Sampai akhirnya izin lingkungan yang ditetapkan gubernur menjadi masalah besar hingga timbul perbedaan sudut pandang dari pemerintah maupun akademisi. Untuk menengahi perbedaan versi dari dokumen izin lingkungan yang dibuat maka dilakukanlah Kajian Lingkungan Hdup Strategis terhadap Pegunungan Kendeng yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan terkait dengan penambangann di Pegunungan Karst Kendeng.

Dalam sengketa mengenai lingkungan, mengucilkan satu sama lain dengan menggunakan label seperti "orang luar" atau "ekstermis" merupakan hal yang umum (Song, 2020). Hal tersebut menurut Opotow dan Weiss (2000) adalah gejala orientasi moral yang memandang target sebagai seseorang yang tidak layak untuk mendapat keadilan, yang pada akhirnya membenarkan dan merasionalisasikan kerugian yang ditimpakan pada mereka. Namun mereka berpandangan bahwa pemegang kekuasaan yang melihat lebih banyak dari perspektif lingkungan berpendapat bahwa keputusan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan dan kesejahteraan manusia secara umum dan alam. Hal ini tidak terjadi pada kasus pembangunan pabrik semen di Kendeng, di mana pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jalannya pembangunan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.

3.2 Analisis konflik dalam Perspektif Marx

Karl Marx dalam Setiadi dan Kolip (2013) membagi dua kelas dalam teori konflik, yaitu antara kelas borjuis (kelas dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang kuat di masyarakat sehingga memungkinkan mereka mengendalikan sistem masyarakat, ekonomi dan sumberdaya), serta kelas proletar, yang umumnya menjadi pekerja atau buruh dan memperebutkan sumber ekonomi, menjual tenaga atau potensi kerja, atau juga bersaing dalam perbutan alat-alat produksi. Kelas borjuis memiliki alat-alat produksi dan memperkerjakan pekerja upah. Sedangkan proletar menjadi kelompok pekerja yang menjual kerja dan potensi yang mereka miliki dan tidak memiliki modal ekonomi maupun alat-alat produksi sendiri. Dalam suatu struktur hirarki sosial demikian, kecenderungan yang terjadi adalah kelas borjuis melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar dalam proses produksi. Marx juga menjelaskan bahwa keteraturan dalam masyarakat kelas proletar disebabkan adanya pemaksaan oleh para penguasa.

Dengan melihat pembagian kelas yang dilakukan Marx maka kelas borjuis dapat dikatakan mudah mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik. Konflik yang terjadi di Pegunungan Kendeng ini cukup relevan dengan teori konflik Karl Marx yang menegaskan bahwa kelompok yang berkuasa memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang tidak dimiliki oleh masyarakat tidak mampu. Retorika polarisasi antara 1 persen terkaya dan 99 persen sisanya menantang peningkatan konsentrasi pendapatan yang telah terja di di sebagian besar negara setidaknya sejak 1980-an hingga saat ini. Derajat monopoli menteorikan derajat monopoli perusahaan dan distribusi pendapatan fungsional. Semakin tinggi derajat monopoli, semakin besar mark up-nya (Rugitsky, 2013). Marx menjelaskan korelasi kuantitatif yang diperlukan untuk reproduksi kapitalisme, bukan untuk menentukan bagaimana keuntungan diciptakan. Marx menyampaikan bahwa monopoli harga untuk komoditas tertentu adalah sederhana.

Kesederhanaan yang dimaksud Marx adalah transfer keuntungan yang diperoleh dari dari produser komoditas lain terhadap komoditas dengan harga monopoli. Proses demikian dapat mengarah pada disturbansi dalam distribusi nilai surplus pada berbagai lingkup

bidang produksi. Semakin besar kekayaan sosial, modal yang berfungsi, tingkat dan energi pertumbuhannya, dan karena itu juga semakin besar massa absolut dari proletariat dan produktivitas kerjanya, semakin besar pula pasukan cadangan industri (Mcintyre, 2011).

Kekayaan sosial, modal dan energi pertumbuhan telah menjadi sebuah kekuatan kapital yang ekspansif. Tingkat ekspansi kapitalisme sebanding dengan massa yang terkonsolidasi (Mcintyre, 2011). Dalam teori Marx, konsolidasi ini terjadi dalam kelas tenaga kerja yang mengalami penderitaan akibat kekerasan selama bekerja sehingga jika ekspansi semakin luas, maka kemiskinan juga semakin meluas, sebagai hukum umum absolut dari akumulasi kapitalis. Namun, dalam kasus Kendeng ini, sumber daya yang dikapitalisasi oleh borjuis ini lah yang diperjuangkan oleh masyarakat sekitar yang terkonsolidasi. Kelas sosial dalam hal ini tidak didefinisikan melalui mode produksi (Smith dan Pun, 2018). namun menjadi konfigurasi konflik antara masyarakat dengan swasta, dimana negara terpecah antara pusat dan daerah (dengan kekuatan otonominya). Tarik ulur dalam perebutan kekuasaan atas sumber daya mengakibatkan kekerasan pada golongan masyarakat lokal yang memiliki tradisi menjaga sumber daya alam tersebut sesuai hukum adat atau kebiasaannya, dengan kerakusan para borjuis untuk menguasainya. Ada benturan terkait dengan hak kepemilikan formal terhadap tenurial antara masyarakat Samin dengan Swasta yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh negara. Dalam kurun waktu sekitar seperempat abad terakhir, literatur dalam ekologi politik kemudian mengklaim nilai-nilai Marxian secara meluas (Robertson dan Wainwright, 2013).

Ahli ekologi politik jarang terlibat dengan nilai Marx dan lebih berfokus terdapat krisis dan identitas yang lebih genting, seperti misalnya, pengakuan secara formal atas penguasaan tanah (Robertson dan Wainwright, 2013). Hak kepemilikan tanah telah diformalkan dan merupakan bagian integral dari transaksi tanah secara global dan nasional. Pengakuan melalui prosedur formal ini menjadi prasyarat untuk pengakuan lembaga internasional atas kepemilikan tanah negara, swasta, atau nirlaba (Peluso dan Vandergeest, 2001). Formalisasi kepemilikan atas tanah bertujuan untuk membuat tanah, penggunaannya, penggugatnya, dan miliknya yang dapat dikontrol oleh otoritas negara (Kelly dan Peluso, 2015). Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang biasanya digunakan untuk membantu menjaga situs warisan dunia, kiranya dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melindungi tanah ulayat. Dengan meningkatkan kesadaran akan HAM dan mengembangkan sumber daya manusia, maka penduduk di sekitar lokasi memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjaga tanah moyangnya. Dengan kata lain, pihak luar baik pemerintah maupun swasta tidak dapat mengintervensi atau pun ekspansi tanah yang menjadi milik bersama suatu komunitas/ulayat. Pemahaman tersebut menggaris bawahi beberapa hal, di antaranya adalah standar HAM memasukkan dan mengambil prinsip dari Universal Declaration of Human Rights dan instrumen HAM lain (Kraak, 2017). Indonesia memiliki instrumen HAM dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dalam Pasal 28. UUD 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat adat bahkan sebelum diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Semenjak adanya sistem modern berstandar global, nasional, kapital dan tanah saling terkait dimana relasinya tidaklah statis. Dinamika kapital dan penguasaan atas tanah ini dapat menundukkan sistem negara dengan cara yang bervariasi. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat adanya benturan antara ekspansi kapitalis dan logika perlindungan. Menjadi hal umum bagi para politisi untuk menyampaikan bahwa lingkungan hidup saat ini sedang terancam, namun perlu diakui bahwa terdapat perbedaan dalam menilai alam dan sumber dayanya (Robertson dan Wainwright, 2013). Hal ini, menurut pandangan politik-ekonomi abad ke-19 disebut dengan dualisme umum. Selain itu, banyaknya pihak yang berperan menimbulkan banyaknya konflik kepentingan, termasuk aktor-aktor negara. Kepentingan aktor negara yang berbeda dengan kekuatan sosial yang dimilikinya, juga berperan dalam menciptakan ketegangan dalam kebijakan pertanahan (Kelly dan Peluso, 2015). Sebagai contoh pada bulan Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa klaim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) atas Kawasan Hutan tidak sah. Dengan mengacu kembali pada pengakuan masyarakat adat dalam UUD 1945, keputusan tersebut menyatakan bahwa masyarakat

hukum adat sebagai subyek hukum. Lebih lanjut, keputusan MK tersebut merupakan pengakuan terhadap Wilayah Masyarakat Hukum Adat, yang sebelumnya tidak pernah diresmikan di bawah hukum Indonesia (Kelly dan Peluso, 2015). Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan MK No No. 35/PUU-X/2012, yang memberikan hak atas tanah ulayat kepada masyarakat adat yang telah mendiaminya secara turun temurun, memiliki sistem, kepercayaan dan aturan hidup dan mengelola wilayahnya secara komunal. Masyarakat Suku Samin dan aliran kepercayaannya sendiri telah diakui secara legal oleh pemerintah. Maka, wilayah hutan adat harus dikeluarkan dari Hutan Negara (Nasional) untuk kemudian secara resmi disebut dan diakui sebagai hutan adat dimana pengelolaan dan penguasaannya menjadi hak komunal masyarakat adat. Dalam kasus Kendeng ini, konsep nilai Marx hampir tidak dipandang sebagai bahan pertimbangan. Padahal ketidakhadiran konsep nilai Marx semakin penting untuk diskusi luas tentang nilai dalam pendekatan kritis lainnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup (Robertson dan Wainwright, 2013). Dengan Teori Marx, analisis sistem kehidupan manusia dengan lingkungan menjadi penting, sebagai bukti penting pandangan Negara terhadap nilai alam dan lingkungan hidup tercermin dalam gejala kasus pabrik semen yang menjarah tanah suku Samin di Kendeng. Yakni, bagaimana Negara mampu hadir, mengelola dan menjamin keberlangsungan sumber daya alam serta kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana UUD 1945 telah mengamanahkannya.

Diskusi teori Marx dalam kasus sengketa tanah memang jarang dibahas dalam permasalahan konflik tenurial di Indonesia. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang fundamental dalam konsep kapitalisme Marx. Marx menuliskan dalam bukunya, *Capital* (1867), sebagai berikut, "Uang adalah nilai yang terbentuk sendiri secara universal dari segala sesuatu. Oleh karena itu, ia telah merampas seluruh dunia, baik dunia (kemanusiaan) maupun alam, yakni dari nilai spesifiknya". Bagi Marx, alam adalah sumber kekayaan, memberikan nilai guna, dan diperlukan untuk penciptaan komoditas, sehingga dengan demikian, alam dan lingkungan hidup memiliki nilai yang harus dipertahankan. Modal yang disediakan alam secara melimpah ini, sayangnya seringkali menjadi akar dari masalah konflik tenurial. Perebutan dan eksploitasi sumber daya secara terus-menerus dapat memperparah relasi kelas dalam teori Marx. Marx berharap kepada kita, generasi jauh setelahnya, agar dapat melihat produksi komoditas sebagai proses yang melibatkan interaksi antara sosial dengan alam, dimana dapat dikatakan bahwa proses produksi komoditas ini juga menentang taksonomi yang memisahkan interaksi manusia dengan alam semesta.

Dari kasus konflik tenurial yang terjadi di Kendeng, terdapat nilai-nilai dasar dalam pendekatan kritis geografi manusia dengan lingkungan, bahwa tidak ada batas rigid antara keduanya, dengan kata lain, manusia dan alam merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pembatasan kedua nilai tersebut (manusia-lingkungan) adalah hasil rekayasa manusia dengan kepentingannya dan bersifat fiktif. Pemisahan manusia dengan alam ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari penerapan bentuk nilai kapitalis, dimana dunia dan tenaga kerja yang hidup menghasilkan kekayaan. Nilai alam sebagai sumber daya dan sumber kekayaan adalah nilai yang tidak dapat ditangkap hanya dengan harga uang. Nilai alam sebagai penyedia jasa ekosistem, seperti sumber mata air di Kendeng, dapat menghidupi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat kemudian secara alami beradaptasi dengan lingkungannya yang berupa bentang lahan karst yang sangat sensitif terhadap air. Ketergantungan dan pengetahuan masyarakat ini kemudian terejawantahkan dalam kebijaksanaan/kearifan kehidupan mereka, bagaimana mereka mengelola sumber penghidupan untuk bertahan hidup dan alam sebagai pemilik "modal" (natural capital) dan dorongan untuk mempertahankan keberadaan modal itu secara berkesinambungan lintas generasi. Dorongan akumulasi dari kesemuanya dapat mengubah hubungan sosial-kultural untuk menerapkan prinsip-prinsip sustainabilitas. Kami berpendapat bahwa tradisi hubungan manusia dengan lingkungan memang cukup terlambat untuk dipertemukan dengan teori nilai Marx, yang dalam hal ini secara tegas kami katakan bukanlah "teori nilai kerja".

3.3 Peran wanita dalam konflik kendeng

Dalam protes yang dilakukan oleh berbagai kelompok atas terjadinya kerusakan lingkungan, perempuan hadir sebagai kelompok terdepan sekaligus menjadi kelompok yang lebih banyak mengalami penindasan dari laki-laki. Pada kasus konflik di Kendeng, posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat terus berkembang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan sebagai komponen masyarakat serta pendapatnya dapat menjadi input suatu kebijakan sosial (Fitri dan Akbar, 2017). Dari segi demografi peran perempuan pada konflik kendeng akibat dari migrasi besar-besarkan laki-laki dari desa ke kota sehingga akses perempuan pada lahan, sawah, kebun dan hutan mengalami peningkatan (Sulistyati, 2018). Dalam konflik Pabrik Semen di Kendeng terdapat dua tokoh wanita yang penting yaitu Gunretno dan adik perempuannya Gunarti, keduanya mewakili masyarakat adat SS. Dalam perjalanan konflik ini masyarakat adat SS mendapat dukungan dari Pusat Studi, Advokasi, dan dokumentasi hak-hak masyarakat adat (pusaka), yayasan desantara, Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), dan OMS tingkat lokal maupun nasional (Suharko, 2017). Dalam protes yang dilakukan oleh berbagai kelompok atas terjadinya kerusakan lingkungan, perempuan hadir sebagai kelompok terdepan sekaligus menjadi kelompok yang lebih banyak mengalami penindasan dari laki-laki. Pada kasus konflik di Kendeng, posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat terus berkembang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan sebagai komponen masyarakat serta pendapatnya dapat menjadi input suatu kebijakan sosial (Fitri dan Akbar, 2017). Dari segi demografi peran perempuan pada konflik kendeng akibat dari migrasi besar-besarkan laki-laki dari desa ke kota sehingga akses perempuan pada lahan, sawah, kebun dan hutan mengalami peningkatan (Sulistyati, 2018). Dalam konflik Pabrik Semen di Kendeng terdapat dua tokoh wanita yang penting yaitu Gunretno dan adik perempuannya Gunarti, keduanya mewakili masyarakat adat SS. Dalam perjalanan konflik ini masyarakat adat SS mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain; Pusat Studi, Advokasi, dan dokumentasi hak-hak masyarakat adat (pusaka), Yayasan Desantara, Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), dan OMS tingkat lokal maupun nasional (Suharko, 2017).

Rencana pembangunan pabrik semen dan lahan pertambahan di Pegunungan Kendeng menuai beragam reaksi dari masyarakat desa setempat. Ada yang menjadi bagian dari perusahaan untuk pendistribusian bahan makanan atau menjadi karyawan pabrik, sedangkan yang lain berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai dampak apa yang akan terjadi apabila pabrik didirikan dan dilakukan kegiatan penambangan. Penolakan yang terjadi selanjutnya disuarakan oleh perempuan yang merasa keberatan dengan penurunan kualitas lingkungan yang dinilai akan berdampak pada kehidupan mereka (Lestariningsih dan Wariyatun, 2015). Perlawanan yang dilakukan para petani Pegunungan Kendeng Utara diwakili oleh kaum ibu-ibu mempunyai landasan yang kuat yaitu untuk menyelamatkan lingkungan dari kegiatan pertambangan demi generasi yang akan datang. Puncaknya ketika salah satu petani perempuan bernama Yu Patmi meninggal dunia setelah melakukan aksi pengecoran kaki di depan Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pembangunan pabrik semen di kawasan tersebut.

4. Kesimpulan

Di dalam suatu daerah pemerintah setempat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam yang terkandung. Kebijakan tersebut seharusnya dapat dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan fisik, biotik, dan sosial kawasan tersebut. Meskipun telah dilakukan beberapa tindakan hukum pada konflik yang terjadi dalam kasus penambangan semen di Pegunungan Kendeng, baik oleh masyarakat pedesaan dan LSM lingkungan, hal itu tidak berpengaruh terhadap keputusan otoritas. Konflik muncul akibat dari ketidakselarasan tujuan antara kedua pihak yang berkonflik. Masyarakat adat meyakini bahwa ekosistem pegunungan karst harus dilestarikan

sedangkan pihak investor batu kapur yang dihasilkan dari pegunungan kendeng adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan kepemimpinan di berbagai level akibat dari konflik dapat berakibat keada masa konflik yang tidak berakhir, sehingga diperlukannya pemilihan jalur hukum melalui lembaga peradilan. Perubahan hubungan antara Negara dengan kapital melalui formalisasi kepemilikan tanah menjadi tahap awal terjadinya kapitalisme terhadap suatu wilayah.

Berdasarkan Marx, konflik ini akan mudah terjadi akibat adanya perbedaan kelas yaitu kelas borjuis dan proletar. Dimana kelas borjuis adalah investor dan aktor lain yang memiliki kekuasaan, sedangkan kelas proletar adalah masyarakat. Selain itu pembagian kelas ini dapat berakibat adanya kekerasan amuapun pelanggaran HAM dalam konflik. Pada pelaksanaannya keputusan pembangunan maupun pemberian izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan tetap dikembalikan kepada kewenangan daerah. Sejalan dengan teori konflik Karl Marx bahwa kelompok yang berkuasa memiliki akses sumber daya yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Peran wanita dalam gerakan perlawanan ini cukup signifikan dengan menjadi perwakilan yang menyuarakan penolakan mereka terhadap pembangunan pabrik semen. Maka dari itu dalam sebuah perencanaan pembangunan pabrik dan kegiatan pertambangan diperlukan perencanaan yang tepat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar lahan. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dan ikut terlibat dalam proyek tersebut, sehingga kemungkinan untuk terjadi sengketa dapat diminimalisir.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, A.H., A.P., dan A.W.; Metodologi, A.H., A.P., dan A.W.; Perangkat Lunak, A.H., A.P., dan A.W.; Validasi, A.H., A.P., dan A.W.; Analisis Formal, A.H., A.P., dan A.W.; Investigasi, A.H., A.P., dan A.W.; Sumber Daya, A.H., A.P., dan A.W.; Kurasi Data, A.H., A.P., dan A.W.; Penulisan - Persiapan Draf Awal, A.H., A.P., dan A.W.; Penulisan - Penelaahan dan Penyuntingan, A.H., A.P., dan A.W.; Visualisasi, A.H., A.P., dan A.W.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Alden, M. G. (2009). Remote Sensing Techniques for Monitoring Coal Surface Mining and Reclamation in the Powder River Basin Remote Sensing Techniques for Monitoring Coal Surface Mining and Reclamation in the Powder River Basin (Issue November). Ohio University.
- Cahyadi, A., & Priadmodjo, A. (2012). Pengaruh Penambangan Gamping Terhadap Fungsi Penyerapan Karbondioksida (Co₂) Atmosfer Di Kawasan Karst Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Seminar Nasional Geospatial Day 2012.
- Danardono, Haryono, E., & Widyastuti, M. (2019). Potential of Carbon Stocks and Its Economic Values in Tropical Karst Landscape (Case Study in Biduk-Biduk Karst, East Kalimantan, Indonesia). *Journal of Physics: Conference Series*, 1373(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1373/1/012030>
- Enger, E. D., & Smith, B. F. (2016). *Environmental Science a Study of Interrelationships* (Fourteenth).
- McGraw-Hill Higher Education. Fifying, Gultom, R. A. G., Pratama, B. M., & Anggraeni, G. (2018). Application of remote sensing monitoring of limestone mining exploitation in Mountain Kendeng. *Borneo International Conference on Applied Mathematics and Engineering (BICAME)*, 2, 184–187. <https://doi.org/10.1109/BICAME45512.2018.1570495527>
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *CosmoGov*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634>
- Ford, K., & McColloch, W. (2012). Thorstein veblen: A marxist starting point. *Journal of Economic Issues*, 46(3), 765–778. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624460309>
- Fuchs, C. (2017). Critical Social Theory and Sustainable Development: The Role of Class, Capitalism and Domination in a Dialectical Analysis of Un/Sustainability. *Sustainable Development*, 25(5), 443–458. <https://doi.org/10.1002/sd.1673>
- García-Frapolli, E., Ayala-Orozco, B., Oliva, M., & Smith, R. J. (2018). Different approaches towards the understanding of socio-environmental conflicts in protected areas. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su10072240>
- Genç, K. Y. (2013). Natural Environment as a Strategic Issue for Firms: Theoretical Perspectives. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 143–153. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.480>
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117–124. [https://doi.org/10.1016/0014-4894\(54\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X)
- Hadi, S. P., Purnaweni, H., Hadiyanto, & Prabawani, B. (2018). Sustainable use of water resource at North Kendeng Mountain, Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 191(1), 0–5. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/191/1/012005>

- Hadi, S. P., Purnaweni, H., Prabawani, B., & Hamdani, R. S. (2020). Community Movement for Sustainable Use of Natural Resources: Case study of North Kendeng Mountain Area, Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 448(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012069>
- Haryono, E., Suratman, W., Srijono, Mufti, A. L., Suwarsono, & Hariyati, N. (2002). Zonasi Kawasan Karst Kabupaten Wonogiri. In *Journal of Social Issues* (Vol. 56, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00179>
- Hidayatullah, Umar, Rini, H. S., & Arsal, T. (2016). Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik Pt. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5(1), 10–21.
- Honneth, A. (2018). A moral em O capital. 669–682.
- Iqbal, M. F., Riaz Khan, M., & Malik, A. H. (2013). Land use change detection in the limestone exploitation area of Margalla Hills National Park (MHNP), Islamabad, Pakistan using geo-spatial techniques. *Journal of Himalayan Earth Sciences*, 46(1), 89–98.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan (Vol. 1). (2017).
- Kelly, A. B., & Peluso, N. L. (2015). Frontiers of Commodification: State Lands and Their Formalization. *Society and Natural Resources*, 28(5), 473–495. <https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1014602>
- Khusnia, K., & Warsito. (2018). Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 3, 1–20.
- Kraak, A. L. (2017). Impediments to a human rights-based approach to heritage conservation: the case of Bagan, Myanmar. *International Journal of Cultural Policy*, 23(4), 433–445. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1066782>
- Langhans, S. D., Jähnig, S. C., Lago, M., Schmidt-Kloiber, A., & Hein, T. (2019). The potential of ecosystem-based management to integrate biodiversity conservation and ecosystem service provision in aquatic ecosystems. *Science of the Total Environment*, 672, 1017–1020. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.025>
- Lestariningsih, D., & Wariyatun. (2015). “nDuweni Ibu Pertiwi” (Keeping the motherland): Women’s agency to resist cement plants in Tegaldowo and Timbrangan villages, Rembang. *Asian Journal of Women’s Studies*, 21(2), 166–179. <https://doi.org/10.1080/12259276.2015.1062271>
- Lin, B. B., & Egerer, M. H. (2020). Global social and environmental change drives the management and delivery of ecosystem services from urban gardens: A case study from Central Coast, California. *Global Environmental Change*, 60(November 2019), 102006. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102006>
- Lucas, M. T. (2010). Understanding environmental management practices: Integrating views from strategic management and ecological economics. *Business Strategy and the Environment*, 19(8), 543–556. <https://doi.org/10.1002/bse.662>
- Ma’arif, M. R., & Imron, A. (2014). Gerakan Perlawanan LSM Cagar Tuban Terhadap Pembangunan PT. Holcim Indonesia. *Paradigma*, 2(01), 1–9. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6639/7373>
- Mcintyre, M. (2011). Race, Surplus Population and the Marxist Theory of Imperialism. *Antipode*, 43(5), 1489–1515. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2011.00898.x>
- Miller & Spoolman. (2016). *Environmental Science (Fifteenth)*. MA Cengage Learning.
- Omer, S., & Jabeen, S. (2016). Exploring Karl Marx conflict theory in education: Are Pakistani private schools maintaining status Quo? *Bulletin of Education and Research*, 38(2), 195–202.
- Parise, M., Closson, D., Gutiérrez, F., & Stevanović, Z. (2015). Anticipating and managing engineering problems in the complex karst environment. *Environmental Earth Sciences*, 74(12), 7823–7835. <https://doi.org/10.1007/s12665-015-4647-5>
- Parra, C., & Walsh, C. (2016). Socialities of Nature Beyond Utopia. *Nature and Culture*, 11(3), 229–238. <https://doi.org/10.3167/nc.2016.110301>

- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Pravitasari, A. E., Rustiadi, E., Adiwibowo, S., Wardani, I. K., Kurniawan, I., & Murtadho, A. (2020). Dinamika Dan Proyeksi Perubahan Tutupan Lahan Serta Inkonsistensi Tata Ruang Di Wilayah Pegunungan Kendeng. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.99-112>
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>
- Robertson, M. M., & Wainwright, J. D. (2013). The Value of Nature to the State. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(4), 890–905. <https://doi.org/10.1080/00045608.2013.765772>
- Rokhmad, A. (2020). Configuration and the role of community leaders in the conflict of natural resources of limestone mining for the cement industry in Rembang Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2), 521–528. <https://doi.org/10.32479/ijeep.8321>
- Rugitsky, F. M. (2013). Degree of monopoly and class struggle: Political aspects of Kalecki's pricing and distribution theory. *Review of Keynesian Economics*, 1(4), 447–464. <https://doi.org/10.4337/roke.2013.04.06>
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan. Kencana.
- Singh, V. (2014). An Impact and Challenges of Sustainable Development in Global Era. *Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 327–337.
- Smith, C., & Pun, N. (2018). Class and Precarity: An Unhappy Coupling in China's Working Class Formation. *Work, Employment and Society*, 32(3), 599–615. <https://doi.org/10.1177/0950017018762276>
- Song, H. (2020). Perceived standing: exploring why people accept or reject others' access to public participation in local environmental conflicts. *Local Environment*, 25(5), 397–413. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1753667>
- Stevanovic, Z. (2013). Global trend and negative synergy: climate changes and groundwater over- extraction. *Proceedings International Conference on Climate Change Impact on Water Resources*, 42–45.
- Suharko. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Sulistyati, M. (2018). Pembangunan dan Feminisasi Tanah Di Indonesia (Kajian Ekofeminisme Global). *Jurnal Harkat*, 192(4), 121–130.
- Warassih, E., Sulaiman, & Rika Fatimah, P. L. (2018). Empowering local wisdom in regional mining policies: Study in Pati Regency, Central Java. *Environmental Policy and Law*, 48(5), 317–322. <https://doi.org/10.3233/EPL-180095>
- Yue, L., Hongli, Z., & Jinghui, F. (2015). Application of Remote Sensing Technology in Mine Environment Monitoring. *MATEC Web of Conferences*, 22, 1–6. <https://doi.org/10.1051/mateconf/20152204008>

Biografi Penulis

ANALISSA HUWAINA, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: analissa.huwaina@ui.ac.id
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

ANINDITA PRABAWATI, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: anindita.prabawati@ui.ac.id
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

ANINDYA DEWI, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: anindya.dewi01@ui.ac.id
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: